

**Untuk Apa UMKM Berakuntansi SAK-ETAP?
(Studi pada UMKM Suwar Suwir Manis Kencana Kabupaten Jember)**

Whedy Prasetyo

Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember
E-mail: whedy.p@gmail.com

Abstract

The importance of financial statements in any business entity causes of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) should prepare its financial statements based for financial accounting standards. However financial accounting standards are considered too complicated, so that many MSMEs in the regions do not complied financial statements from their economic activities. Faced with these circumstances, IAI issued Financial Accounting Standards Without Public Accountability (SAK-ETAP) as a standard that applied and the relevant guidelines for reporting financial information of MSMEs which are expected to help MSMEs in preparing financial statements as financial accountability.

This article is explain to MSMEs financial reporting based on SAK-ETAP by qualitative research perspective, aims to understand the importance of the financial statements of MSMEs to economic decision making, so that all MSMEs can develop an understanding of its financial statements under SAK-ETAP, so that the financial statements of MSMEs can be standardized. Why does accounting Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Financial Accounting Standards Without Public Accountability (SAK-ETAP)?

Keywords: *Financial reporting, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), and SAK-ETAP.*

Pendahuluan

Sistem perekonomian Indonesia membutuhkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi yang tangguh. UMKM dan koperasi yang kuat akan berperan signifikan bagi kemajuan ekonomi bangsa. Diukur secara kuantitas, peranan UMKM saat ini cukup nyata, terlebih dilihat dari jumlah unit usaha dan daya serap tenaga kerja yang tinggi. Selain juga sumbangsihnya yang lumayan besar bagi produk domestik bruto. Fakta yang mampu untuk meletakkan UMKM sebagai ekonomi strategis, yang perlu mendapat perhatian dan pengembangan secara konsisten dan berkelanjutan (Kompas, 9 Juli 2009).

Perhatian dan pengembangan UMKM memberikan upaya untuk dapat menata pengelolaan dana, selama tahun 2005-2012 data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan hanya 10 persen UMKM yang memiliki sistem pembukuan. Sisanya berjalan tanpa pembukuan sehingga pengelolaan dana pun tidak jelas dan transparan,

untuk itu pemahaman para pelaku UMKM dalam mengetahui pembukuan atas penyusunan laporan keuangan dari hasil aktivitas usahanya sangat ditekankan. Harapannya pengelolaan dana akan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Kompas, 23 Mei 2012).

Penyusunan laporan keuangan yang terstandar bagi UMKM memberikan dorongan bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan menawarkan solusi ekonomi berbasis akuntansi melalui penerbitan standar Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) untuk pembangunan ekonomi berbasis UMKM. Sebagian besar UMKM terkategori *feasible* tidak *bankable*, sulit memperoleh dana kredit bank karena tak mampu menyediakan agunan dan atau laporan keuangan.

Standar ETAP pada umumnya adalah UMKM, jumlah UMKM sampai (Juni 2012) berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah UMKM yang berjumlah 52,68 juta ditambah 132.000 unit koperasi, yaitu sebanyak 62 % (persen) sebagai usaha mikro, 32 % (persen) usaha kecil dan 6 % (persen) usaha menengah. Besarnya jumlah tersebut dikarenakan adanya PHK dan lulusan Perguruan Tinggi (PT) yang menjadi wirausaha. Namun apabila menekankan usaha mikro terlampaui rendah untuk diharapkan dapat berakuntansi standar ETAP, maka standar ETAP sebagai upaya dirancang untuk sekitar 16,86 juta entitas meliputi 12,65 juta usaha kecil, 4,21 juta unit usaha menengah, 132.000 unit koperasi, serta 42.000 yayasan dan berbagai jenis ETAP lainnya. Usaha besar tertutup sekitar 1.680 unit usaha pada umumnya telah berhubungan dengan fasilitas kredit perbankan dan atau tergolong industri teregulasi ketat (entitas, asuransi, perbankan dan perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan efek dll) yang sukses menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Besar, sedang 342 unit usaha lain telah masuk bursa dan sudah sukses menerapkan PSAK Besar. Group usaha menggunakan PSAK Besar, termasuk anak perusahaan berskala menengah atau kecil karena akan dikonsolidasi dengan induk yang telah berakuntansi berdasarkan PSAK Besar.

Namun dukungan untuk menumbuhkan UMKM tersebut tidak sejalan dengan kemampuan UMKM di dalam memperoleh dana pembiayaan perbankan, padahal pertumbuhan ekonomi dari tahun 2009, 2010, 2011 dan pertengahan 2012 ditentukan oleh sektor domestik melalui pertanian. Target pertumbuhan ekonomi 2012 adalah 9,2 % (persen). Untuk mampu mencapai pertumbuhan 12 % (persen) dibutuhkan pertumbuhan investasi sekitar 30 % (persen) (Jawa Pos, 3 Juli 2012).

Dukungan perhatian para pelaku UMKM dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pembuatan laporan keuangan akan mampu menunjukkan akses bagi UMKM untuk mempertanggungjawabkan keuangan dan kinerjanya, baik untuk kepentingan internal usaha maupun bagi pihak eksternal atas hasil usahanya (Prasetyo, 2008; Prasetyo dan Fatmawati Gf, 2011). Penyusunan Laporan keuangan UMKM sebagai upaya untuk menyakinkan pihak pembiayaan dalam pengambilan keputusan bantuan pembiayaan sebagai modal usaha, upaya yang mengharuskan UMKM untuk menyusun laporan keuangan (Umar, 2010)

Peranan perbankan di dalam membantu pembiayaan UMKM didasarkan pada kemampuan UMKM untuk dapat menyusun laporan keuangan, tujuannya sebagai sarana pengaman kredit niragunan. Demikian juga bagi perbankan syari'ah berbasis "bagi hasil" bersyarat debitur UMKM juga dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan sebagai basis "bagi hasil" tersebut (Herani, 2010; Prestianto dan Sringing P, 2010). Penelitian ini mendorong pelaku UMKM untuk melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar ETAP, sebagai upaya untuk mengubah posisi UMKM menjadi *feasible*, *auditable* dan *bankable*. Standar ETAP yang telah diberlakukan efektif tanggal 1 Januari 2010 diharapkan meningkatkan kemampuan UMKM mendapatkan fasilitas kredit dan mendorong pertumbuhan investasi 2012.

Rumusan Masalah

Perlunya pengembangan pemahaman mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan bagi UMKM (Umar, 2010), sehingga bagaimana UMKM dalam penyusunan laporan keuangan terhadap kegiatan ekonomiknya yang terstandarisasi, berdasarkan pemahaman atas berakuntansi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan upaya untuk mendorong perlunya UMKM untuk berakuntansi berdasarkan standarisasi laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

Manfaat Penelitian

Menambah kontribusi kajian pengetahuan keilmuan akuntansi kewirausahaan baik dari segi kegiatan ekonomik usaha, khususnya kegiatan ekonomik UMKM atas

penyusunan laporan keuangan yang sebenarnya merupakan faktor yang sangat penting untuk kelangsungan pengelolaan keuangan UMKM.

Bagi UMKM, penelitian ini memaparkan pentingnya penyusunan laporan keuangan dan penerapan akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang bermanfaat luar biasa bagi transparansi pengelolaan keuangan UMKM. Dengan berakuntansi yang memadai, maka UMKM dapat memenuhi persyaratan penyusunan laporan keuangan dalam pengajuan kredit ke bank, juga untuk mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan dan manfaat-manfaat lainnya.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ETAP yaitu standar mandiri (*stand alone*) terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Besar dan PSAK Syariah. Penerapan PSAK ETAP untuk perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik atau menurut peraturan yang dikeluarkan oleh regulator harus menggunakan Pernyataan ini dalam menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum kepada pengguna eksternal. Penyajian laporan keuangan yang wajar untuk laporan keuangan meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Penyajian wajar harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap PSAK ETAP, kelangsungan usaha, frekuensi pelaporan, penyajian yang konsisten, informasi komparatif, materialitas dan agregasi, laporan keuangan yang lengkap dan identifikasi laporan keuangan.

- **Neraca**, harus menyajikan informasi atas aset, kewajiban dan ekuitas. Bab ini membahas sistem pengelompokan dan urutan penyajian atas informasi tersebut serta informasi yang disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.
- **Laporan Laba Rugi**, menyajikan penghasilan dan beban untuk satu periode. Bagian ini membahas informasi yang harus disajikan dalam Laporan Laba Rugi juga Catatan Atas Laporan Keuangan serta analisa beban.
- **Laporan Perubahan Ekuitas**, menyajikan laba atau rugi entitas, pos penghasilan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan, dan jumlah investasi, dividen dan distribusi dari dan ke pemilik ekuitas selama satu periode. Laporan penghasilan dan

saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk periode yang bersangkutan.

- **Laporan Arus Kas**, memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu entitas yang memperlihatkan secara terpisah perubahan yang terjadi dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan selama periode yang bersangkutan. Suatu entitas harus melaporkan aktivitas arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu metode yaitu metode langsung atau metode tidak langsung.
- **Catatan Atas Laporan Keuangan**, berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (DSAK-IAI, 2009).

Bila memiliki, pada setiap tanggal neraca, entitas harus mengukur instrumen keuangan berikut pada harga perolehannya atau harga perolehan setelah diamortisasi (*amortised cost*), dikurangi dengan penurunan nilai instrumen keuangan terkait. Pengukuran persediaan dengan menggunakan metode nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dengan harga jual dikurangi biaya penyempurnaan dan biaya penjualan. Entitas investor harus mencatat investasi di semua perusahaan asosiasi menggunakan salah satu dari (a) model biaya, atau (b) metode ekuitas. Tak akan banyak ETAP mempunyai aset berupa bukan aset tetap untuk operasi utama. Properti investasi hanya menggunakan *cost model* (Hoesada, 2009^a).

Dalam banyak hal ETAP, transaksi dagang ETAP amat sederhana sehingga tidak menimbulkan kewajiban diestimasi akibat dari transaksi masa lalu, dan besar kemungkinan (*probable*) bahwa entitas akan disyaratkan untuk mengalihkan manfaat ekonomis pada saat penyelesaian; dan nilai kewajiban tersebut dapat diestimasi dengan andal. Pada saat pengakuan awal, entitas harus mencadangkan suatu jumlah berdasarkan estimasi terbaik atas nilai kewajiban yang disyaratkan untuk dilunasi tersebut pada tanggal pelaporan. Pada pengakuan selanjutnya, entitas hanya boleh membebankan pada nilai penyisihan dengan berbagai pengeluaran terkait yang telah diakui pada penyisihan sebelumnya (Warsono, dkk, 2010: 115).

ETAP mungkin bisa berbentuk PT atau bentuk kelembagaan lain. Suatu entitas harus mengakui penerbitan saham atau instrumen ekuitas lainnya sebagai ekuitas, ketika entitas tersebut menerbitkan instrumen itu dan pihak lain berkewajiban untuk memberikan kas atau sumber daya lain kepada entitas tersebut sebagai pengganti instrumen tersebut. Entitas harus mengukur instrumen ekuitas pada nilai wajar dari kas

atau sumber daya lain yang diterima atau piutang, setelah dikurangi dengan biaya langsung dari penerbitan instrumen ekuitas tersebut.

Entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar penghasilan yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan volume pengembalian yang diperbolehkan oleh entitas. Apabila aliran penerimaan kas atau setara kas ditangguhkan, dan perjanjian dapat diklasifikasikan sebagai transaksi keuangan, nilai wajar yang diperoleh adalah nilai kini dari seluruh penerimaan masa depan yang ditentukan berdasarkan tingkat bunga yang melekat. Dalam peristiwa jarang kemungkinan adanya aset terklasifikasi yang dikonstruksi menggunakan dana kredit. Entitas harus menghitung seluruh biaya pinjaman dengan menggunakan model beban. Entitas harus mengakui seluruh biaya pinjaman sebagai suatu beban dalam laba rugi pada periode dimana beban tersebut terjadi.

Entitas harus menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah persediaan akan turun nilainya (*impaired*). Entitas harus membuat penilaian dengan membandingkan jumlah tercatat masing-masing jenis persediaan (atau grup persediaan yang sama) dengan harga jual dikurangi biaya-biaya untuk menyelesaikan dan menjual persediaan tersebut. Entitas harus membuat penilaian baru atas harga jual dikurangi biaya-biaya untuk menyelesaikan dan menjual dalam setiap periode berikutnya.

Untuk aset non keuangan selain persediaan, entitas harus menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa ada aset yang akan turun nilainya. Jika indikasi tersebut ada, entitas harus mengestimasi nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset tersebut. Lebih lanjut kesederhanaan akuntansi perpajakan diupayakan. Suatu entitas harus mengakui suatu kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Suatu entitas harus mengakui suatu aset untuk manfaat terkait atas saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan untuk kewajiban pajak kini dan periode sebelumnya (Hoesada, 2009^a).

Dukungan globalisasi dan perdagangan internasional, makin banyak ETAP bertransaksi dalam valuta asing. Entitas harus mencatat transaksi mata uang asing, pada pengakuan awal dalam mata uang fungsional, untuk sejumlah mata uang asing dengan menggunakan kurs tukar *spot* antara mata uang fungsional dan mata uang asing tersebut pada tanggal transaksi. Tanggal transaksi adalah tanggal dimana

transaksi pertama kali memenuhi syarat pengakuan sesuai dengan pernyataan ini. Untuk tujuan praktis, yaitu pada akhir setiap periode pelaporan, entitas harus menjabarkan transaksi moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs penutup; menjabarkan transaksi non-moneter yang diukur dengan biaya perolehan historis dalam mata uang asing menggunakan kurs tukar pada tanggal transaksi; dan menjabarkan transaksi non-moneter yang diukur dengan nilai wajar dalam mata uang asing menggunakan nilai tukar pada saat nilai wajar ditentukan (Hoesada, 2009^b).

Peristiwa setelah akhir periode pelaporan meliputi; seluruh peristiwa yang terjadi sampai ketika laporan keuangan diterbitkan, sekalipun peristiwa-peristiwa tersebut terjadi setelah tanggal pengumuman laba atau informasi-informasi keuangan tertentu lainnya ke publik. Entitas harus membuat penyesuaian terhadap nilai-nilai dalam laporan keuangan termasuk pengungkapan-pengungkapan tertentu, untuk mencerminkan penyesuaian atas peristiwa setelah akhir periode pelaporan. Jumlah-jumlah yang diakui atas peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian setelah akhir periode pelaporan tidak boleh diakui dalam laporan keuangan. Dalam mempertimbangkan setiap kemungkinan hubungan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, ETAP harus menilai dari substansi hubungan dan bukan semata-mata dari bentuk hukum (Hoesada, 2009^a).

Suatu ETAP memiliki aset tetap terbatas, sehingga mungkin sangat jarang melakukan penghentian operasi tanpa menyebabkan penghentian kesinambungan usaha. Suatu operasi yang dihentikan adalah suatu komponen entitas yang akan dilepaskan, atau diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual, dan:

- a). Mencerminkan suatu lini usaha utama atau wilayah operasi geografis utama yang terpisah;
 - b). Merupakan bagian dari suatu rencana tunggal tertentu yang terkoordinasi untuk melepas suatu lini usaha utama atau wilayah operasi geografis; atau
 - c). Adalah anak perusahaan yang diperoleh secara eksklusif untuk dijual kembali.
- PSAK ETAP berlaku efektif tanggal 1 Januari 2010 (DSAK-IAI, 2009).

Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peran yang penting dalam menentukan arah penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan menggunakan analisis kualitatif, melalui analisis kualitatif mengandung makna suatu seperangkat praktik, merangkul ketegangan dan kontradiksi seputar

proyek dirinya ke dalam beragam sejarah disiplinernya sendiri, meliputi metode dan bentuk temuan serta interpretasinya yang digunakannya atas data dengan menggunakan kata dan baris kalimat (Denzin & Lincoln, 2009: 5). Metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini, bertumpu pada analisa dan pengamatan perkembangan pustaka atas konsep pelaporan keuangan pada suatu entitas.

Titik tolak metodologi penelitian kualitatif berdasarkan *grand concepts*, yang sekaligus sudah merupakan *grand theory*, tetapi juga tidak menolak kemungkinan bahwa teori besar belum ditampilkan, melainkan masih berupa konsep besar dimana konstruksi teori dibangun dari konseptualisasi teoritik, sebagai hasil pemaknaan empirik dalam arti konseptual, logis atau etik. Semua itu dibangun dari berbagai varian konsep proporsi atau pendapat yang dikonstruksikan dari sejumlah konsep, dan konsep mendeskripsikan esensi pemahaman realitas pada fokus obyek pengamatan.

Fokus obyek pengamatan penelitian ini, yaitu pada sentral usaha produksi makanan khas Kabupaten Jember yaitu Suwar Suwir Manis Kencana selama 17 bulan antara tanggal 8 Februari 2011 sampai 31 Juli 2012.

Hasil Dan Pembahasan

UMKM Berakuntansi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang berdampak signifikan pada perekonomian tiap daerah. Dengan adanya UMKM di suatu daerah, secara langsung maupun tidak dapat memberikan manfaat ekonomis terhadap penyerapan tenaga kerja atas pengangguran yang terdapat di masyarakat. Namun untuk menjadikan UMKM berhasil bukan berarti tanpa kendala. Tantangan UMKM di Indonesia sebagaimana dikutip sebagian dari tulisan Kuncoro (2008) dalam Warsono, dkk (2010:7):

- a. Ketiadaan pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan UMKM dikelola perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.
- b. Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan renternir.

c. Kekurang-jelasan status hukum sebagian besar UMKM. Mayoritas UMKM merupakan perusahaan perorangan yang tidak berakta notaris, 4,7% tergolong perusahaan perorangan berakta notaris, dan hanya 1,7% yang sudah mempunyai badan hukum seperti misalnya PT / NV, CV, firma, atau koperasi. Pemaparan mengenai latar belakang UMKM selanjutnya menganalisis peluang dan tantangan UMKM dalam membangun perekonomiannya, dapat diketahui bahwa sebenarnya UMKM sangat membutuhkan dorongan dan masukan serta partisipasi dari para akademisi untuk mengajarkan bagaimana pentingnya penyusunan laporan keuangan pada UMKM.

Penyusunan laporan keuangan merupakan penjelasan atas laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan (Warsono, Darmawan dan Ridha, 2009: 62). Makna laporan keuangan secara umum tidak berbeda dengan makna laporan keuangan untuk Usaha Kecil dan Menengah. Fungsi laporan keuangan secara umum juga tidak memiliki perbedaan yang sangat berbeda dengan fungsi laporan keuangan Usaha Kecil dan Menengah. Bagi usaha yang masih berskala kecil dan menengah, menyusun laporan keuangan adalah hal yang enggan dilaksanakan. Hal itu kerap sekali terjadi karena praktisi Usaha Kecil dan Menengah belum menyadari betapa pentingnya laporan keuangan dalam suatu usaha. Laporan keuangan dalam suatu usaha tidak hanya mengenai bagaimana men-debet atau meng-kredit suatu akun atas transaksi yang terjadi.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu mengetahui tujuan dari kegiatan pelaporan keuangan. Berdasarkan SAK-ETAP, dijelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna, dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus, untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Untuk memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (DSAK-IAI, 2009).

Penyusunan laporan keuangan pada UMKM dapat didasarkan pada standar akuntansi keuangan. Seperti halnya standar akuntansi yang dianut oleh perusahaan atau entitas berskala besar, UMKM juga memiliki standar akuntansi yang relevan dan terspesialisasi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan standar akuntansi untuk

entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Namun mengingat definisi UMKM sendiri sering berubah, maka untuk menghindari kerancuan, standar tersebut diberi nama Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

Pada umumnya, entitas tanpa akuntabilitas publik adalah UMKM, oleh karena itu pengguna SAK-ETAP akan banyak terdiri dari entitas dengan kategori UMKM. Penerbitan SAK-ETAP oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ini adalah sebagai alternatif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang boleh diterapkan oleh entitas di Indonesia, sebagai bentuk PSAK yang lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK Umum yang lebih rumit. Dengan harapan, praktisi-praktisi UMKM dapat menyusun laporan keuangannya berdasarkan pemahaman atas SAK-ETAP, sehingga laporan keuangan UMKM dapat terstandarisasi.

Kesulitan-kesulitan UMKM dalam hal pendanaan, merupakan hal yang sangat kerap sekali terjadi. Namun hal tersebut bukanlah merupakan tantangan yang tidak dapat terselesaikan apabila suatu UMKM memiliki laporan keuangan. Laporan keuangan UMKM disini berguna untuk persyaratan mutlak bagi pengajuan kredit pada bank maupun lembaga peminjaman uang lainnya. Melalui laporan keuangan, diri UMKM sendiri akan mampu mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan, menghitung pajak serta menunjukkan keadaan keuangan UMKM kepada bank atau lembaga penjamin kredit (Warsono, dkk, 2010:1). Sehingga dengan adanya laporan keuangan UMKM yang sudah terstandarisasi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), diharapkan kendala-kendala yang dihadapi UMKM serta kekhawatiran pemerintah akan kelangsungan hidup (*going concern*) UMKM dapat teratasi, sebab UMKM telah memiliki laporan keuangan untuk mandiri dan berusaha untuk maju.

Berakuntansi Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK-ETAP

Berdasarkan fokus obyek pengamatan penelitian yaitu sentral usaha produksi makanan khas Kabupaten Jember yaitu Suwar Suwir Manis Kencana. Obyek penelitian mencatat akun-akun kegiatan transaksi secara tertib dan dapat dibuktikan tanggung jawabnya sebagai langkah untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun didasarkan dengan kaidah-kaidah yang terdapat pada SAK-ETAP. Berikut hasil penyusunan laporan keuangan pada UMKM Suwar-Suwir Manis Kencana yang bergerak di bidang dagang.

Gambar 1:
Rekening/akun yang terdapat dalam Suwar-suwir Manis Kencana
Per 30 Juni 2012

Kas	Rp. 14.600.000,00
Perlengkapan	Rp. 4.250.000,00
Penjualan	Rp. 16.450.000,00
Modal Usaha	Rp. 20.100.000,00
Peralatan	Rp. 6.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan	Rp. 1.200.000,00
Hutang	Rp. 3.550.000,00
Biaya Penjualan	Rp. 450.000,00
Biaya Listrik	Rp. 250.000,00
Biaya Bahan Baku	Rp. 4.850.000,00
Biaya Telepon	Rp. 200.000,00
Biaya Pengepakan	Rp. 750.000,00
Biaya Penggilingan	Rp. 550.000,00
Biaya Gaji	Rp. 2.250.000,00
Biaya Perlengkapan	Rp. 450.000,00
Biaya Sewa	Rp. 750.000,00
Biaya Lain-Lain	Rp. 650.000,00

Bentuk laporan keuangan :

Gambar 2: SUWAR-SUWIR MANIS KENCANA
Laporan Laba Rugi
untuk periode yang berakhir 30 Juni 2012

Pendapatan:		
Penjualan		Rp.16.450.000,00
Biaya Produksi:		
Biaya Penjualan	Rp. 450.000,00	
Biaya Listrik	Rp. 250.000,00	
Biaya Bahan Baku	Rp. 4.850.000,00	
Biaya Telepon	Rp. 200.000,00	
Biaya Pengepakan	Rp. 750.000,00	
Biaya Penggilingan	Rp. 550.000,00	
Biaya Gaji	Rp. 2.250.000,00	
Biaya Perlengkapan	Rp. 450.000,00	
Biaya Sewa	Rp. 750.000,00	
Biaya Lain-Lain	<u>Rp. 650.000,00</u>	
		<u>(Rp.11.150.000,00)</u>
Laba Bersih		<u>Rp. 5.300.000,00</u>

Gambar 3: SUWAR-SUWIR MANIS KENCANA
Neraca
Per 30 Juni 2012

Aktiva		Pasiva	
Aktiva Lancar		Kewajiban	
Kas	Rp. 14.600.000,00	Hutang	Rp. 3.550.000,00
Perlengkapan	Rp. 4.250.000,00		
Peralatan	Rp. 6.000.000,00	Ekuitas	
Ak.Peny.Peralatan	<u>(Rp. 1.200.000,00)</u>	Modal Usaha	<u>Rp. 20.100.000,00</u>
Jumlah Aktiva	<u>Rp. 23.650.000,00</u>	Jumlah Pasiva	<u>Rp. 23.650.000,00</u>

Berdasarkan data akun sederhana yang telah dibuat oleh UMKM Suwar-Suwir Manis Kencana dengan mendasarkan SAK-ETAP tersebut, dapat diketahui besarnya masing-masing akun atas transaksi yang terjadi maupun aktivasnya. Kemudian terjadi

transaksi pendapatan dan pengeluaran yang meliputi penjualan suwar-suwir dan pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk rincian biaya produksi serta biaya lain-lain yang ditampilkan dalam laporan laba rugi Suwar-Suwir Manis Kencana. Setelah penyusunan laporan laba rugi, mengelompokkan akun riil ke dalam kelompok aktiva dan pasiva yang meliputi aktiva lancar, aktiva tetap, peralatan dan penyusutannya, serta kewajiban dan ekuitas.

Penutup

Hasil penelitian membuktikan bahwa untuk mencapai transparansi tanggung jawab data keuangan UMKM, perlu untuk berakuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dalam penyusunan laporan keuangannya. Standar yang dapat dipelajari UMKM untuk digunakan pada penyusunan laporan keuangannya.

Pentingnya penyusunan laporan keuangan mendorong UMKM berakuntansi berdasarkan SAK-ETAP. Berakuntansi SAK-ETAP akan memberikan standarisasi dan kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan bagi UMKM sebagai daya tarik tersendiri supaya UMKM dapat menilai kinerja ekonomiknya. Selain itu, dengan berakuntansi SAK-ETAP UMKM dapat memenuhi persyaratan mutlak dalam pengajuan kredit kepada bank maupun lembaga penjamin kredit lainnya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu ketidakmudahan dalam menarik minat UMKM berakuntansi baik melalui penyuluhan dan pembimbingan untuk melakukan penyusunan pelaporan keuangan atas kegiatan ekonomiknya. Praktisi UMKM enggan melaksanakan penyusunan pelaporan keuangan atas kegiatan ekonomiknya karena bagi mereka, menyusun laporan keuangan hanyalah akan berlanjut pada perhitungan pajak penghasilan. Keengganan membayar pajak menjadikan UMKM enggan pula menyusun laporan keuangan, sebab bagi sebagian praktisi UMKM, besarnya pajak hanyalah akan mengurangi pendapatan UMKM.

Terlepas dari keterbatasan tersebut, hasil penelitian ini merupakan upaya peneliti meningkatkan semangat bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam berakuntansi untuk mempelajari penyusunan laporan keuangan yang terstandardisasi atas dasar pemahaman SAK-ETAP.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2009. Inspirational Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Mendekati UMKM Demi Kemajuan Ekonomi. *Harian Kompas*. Kamis 9 Juli.
- Anonim. 2012. Hanya 10 Persen yang Punya Sistem Pembukuan. *Harian Kompas*. Rabu 23 Mei.
- Anonim. 2012. Perbankan Membantu Meningkatkan Pembiayaan UMKM. *Harian Jawa Pos*. Selasa 3 Juli.
- Denzin, N.K., & Y.S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Cetakan 1. (Terj. Dariyatno, dkk). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Mei. Jakarta.
- Herani, R. 2010. How do Entrepreneurs Respond to Uncertainty? Empirical Evidence from Indonesia SMEs. *Makalah Call for Paper*. Arah Kebijakan dan Peran Penelitian Ilmu Manajemen di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: 4-5 Februari.
- Hoesada, J. 2009^a. Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Kebutuhan dan Tantangan. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Tiga Pilar Standar Akuntansi Indonesia (Peluncuran Standar Akuntansi Syariah dalam 3 Bahasa dan Standar Akuntansi ETAP (Usaha Kecil dan Menengah))*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang: 17-18 Juli.
- Hoesada, J. 2009^b. Econocounting: Peranan Strategis Akuntansi Dalam Perekonomian Indonesia. *Seminar Nasional Akuntansi Tiga Pilar Standar Akuntansi Indonesia (Peluncuran Standar Akuntansi Syariah dalam 3 Bahasa dan Standar Akuntansi ETAP (Usaha Kecil dan Menengah))*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang: 17-18 Juli.
- Prasetyo, W. 2008. Strategi Resource-Based dan Inovasi dengan Pendekatan Biaya Daur Hidup Produk Untuk Mencapai Keunggulan Daya Saing. *Jurnal Siasat Bisnis*. Vol. 12. No.3: 241-260.
- Prasetyo, W., & E. Fatmawati Gf. 2011. Menstandarisasi Laporan Keuangan UKM: Memahami SAK-ETAP. *Makalah Call for Paper*. Update Ekonomi, Akuntansi, dan Bisnis Indonesia 2011. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: 28 Juni.
- Prestianto, B., & M. Srinings P. 2010. Peran Product and Process Improvement terhadap Kinerja UMKM Studi pada UMKM Kota Semarang. *Makalah Call for Paper*. Arah Kebijakan dan Peran Penelitian Ilmu Manajemen di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: 4-5 Februari.
- Umar, S. 2010. Pentingnya Komunikasi Pemasaran dan Pembiayaan oleh Swasta dalam Implementasi Knowledge Management pada UMKM Indonesia untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM dalam Dunia Internasional. *Makalah Call for Paper*. Arah Kebijakan dan Peran Penelitian Ilmu Manajemen di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: 4-5 Februari.
- Warsono, S., A. Darmawan, & M. A. Ridha. 2009. *Akuntansi Itu ternyata Logis dan Mudah*. Edisi Kedua. Penerbit Asgard Chapter.
- Warsono, S., dkk. 2010. *Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami dan Dipraktikkan*. Penerbit Asgard Chapter.